

TRAJEKTORI JARINGAN ULAMA DI BONE DAN WAJO 1900-1950 *(ISLAMIC SCHOLAR NETWORKS TRAJECTORY IN BONE AND WAJO IN THE YEAR 1900-1950)*

Taufik Ahmad

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Email; taufik_mukarrama@yahoo.com

ABSTRACT

The formation and development of the Islamic scholar networks cannot be separated with the global and regional socio-political changes. The appearance of political fluctuation in the Middle East affected the development rhythm of the Islamic scholar network in South Sulawesi. This study is intended to analyze the Islamic scholar network in Bone and Wajo regencies in the year 1900-1950. By using historical methodology, this study proves that the Islamic scholar network trajectory in Bone and Wajo regencies works flexibly in responding the socio-political changes in an extent context. In the early decade of 20th century, when Dutch East Indies government to be strong, Islamic intellectual transmission worked in an informal manner done by priests through the recitations of Alquran in the mosque. When the ethical politics of the Dutch East Indies began to generate new educated elite, then, the Islamic scholar networks with local authorities support responded by building a more modern education base. The establishment of Pesantren As'Adiyah in Sengkang and the Amiriah Madrasah in Watampone was a response to the attributes of modern Islamic Education. As a result, the access to education is no longer limited to the kinship circle, it will be loose and more opened space to anyone who wants to study religion. The Islamic intellectual transmission through modern education will then create to new elites in Bone and Wajo communities.

Keywords: *Islamic scholar network trajectory, Islamic intellectual transmission, Pesantren, Bone, Wajo.*

ABSTRAK

Pembentukan dan perkembangan jaringan ulama tidak dapat dipisahkan dengan perubahan-perubahan sosial politik regional dan global. Munculnya gejolak politik di Timur Tengah mempengaruhi ritme perkembangan jaringan ulama di Sulawesi Selatan. Studi ini bermaksud untuk menganalisis jaringan ulama di wilayah Bone dan Wajo 1900-1950. Dengan menggunakan metodologi sejarah, studi ini membuktikan bahwa trajektori jaringan ulama di wilayah Bone dan Wajo bekerja secara fleksibel dalam merespon perubahan sosial politik dalam konteks lebih luas. Pada decade awal abad ke 20, ketika kontrol pemerintah Hindia Belanda menguat, transmisi intelektual Islam bekerja secara non-formal yang diperankan oleh imam-imam melalui pengajian-pengajian kitab di masjid. Ketika politik etis Hindia Belanda mulai menghasilkan elite baru yang terdidik, jaringan ulama pun dengan dukungan otoritas lokal merespon dengan membangun basis pendidikan yang lebih modern. Berdirinya pesantren As'Adiyah di Sengkang dan Madrasah Amiriah di Watampone adalah respon atas pentingnya Pendidikan Islam modern. Akibatnya lebih jauh, akses pendidikan tidak lagi terbatas pada lingkaran kekerabatan, namun melonggar dan semakin terbukanya ruang kepada setiap orang untuk belajar agama. Transmisi intelektual Islam melalui Pendidikan modern ini selanjutnya melahirkan elite-elite baru dalam masyarakat Bone dan Wajo.

Kata kunci: *Trajektori Jaringan Ulama, Transmisi Intelektual Islam, Pesantren, Bone, Wajo*

PENDAHULUAN

Dekade awal sampai pertengahan abad ke-20 merupakan periode penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Perubahan mendasar pada periode ini terutama bermula ketika Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan *pacificatie politiek* (politik fasifikasi) yang berujung penaklukan

seluruh kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada saat yang sama, dinamika sosial budaya berkembang dengan pesat. Jaringan pelayaran dan perdagangan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya mendorong munculnya cara pandang baru, perasaan yang sama, atau komunitas baru yang dibayangkan sebagai negeri jajahan. Komunitas yang

dibayangkan adalah cikal bakal dari rasa kebangsaan (Anderson 2006). Lalu, pada satu sisi, pemerintah kolonial memperkenalkan Pendidikan barat dan menghasilkan elite baru dalam masyarakat jajahan (Niel 2009), dan sementara pada lain sisi, Pendidikan Islam juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menghasilkan elite-elite baru yang bersentuhan dengan dunia Islam secara global. Pusat-pusat transmisi agama Islam terbentuk di berbagai wilayah, jaringan Nusantara-Harrahmain yang semakin terbuka, serta munculnya organisasi-organisasi keagamaan; Sarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan lain sebagainya; menandai betapa era ini begitu penting dinamis.

Wilayah Bone dan Wajo yang menjadi focus penelitian ini tidak terlepas dari perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik masyarakat kolonial tersebut. Penguasaan pemerintahan Belanda setelah jatuhnya Kerjaan Bone 1905, dan pengaktifan kembali pelabuhan Pallime yang berada di wilayah utara Bone mendorong munculnya jaringan-jaringan ulama yang lebih intensif dengan dunia luar. Pelabuhan Pallime yang berada di muara sungai Cenrana merupakan terminal yang menghubungkan tiga wilayah Bugis; Wajo, Bone dan Soppeng. Pelabuhan ini juga merupakan infrastruktur penting yang membuka jalur perkembangan agama Islam di wilayah Bone.

Jika dibentangkan sejarah perkembangan Islam di Bugis terutama pada pertengahan abad ke-20 memperlihatkan sebagai periode pembentukan jaringan dan transmisi keilmuan berporos di pesantren As'adiyah, Sengkang, Wajo. Akan tetapi, apa yang terjadi sebelum berdirinya pesantren As'adiyah? Bagaimana proses pembentukan jaringan ulama di tingkat lokal? Seperti apa jaringan itu berkembang? Siapa aktor dalam jaringan ulama itu, apakah bertali temali dengan penguasa atau pemegang otoritas lokal? Adalah pertanyaan-pertanyaan awal yang mendasari studi ini. Oleh karena itu, studi ini mencoba melihat jaringan ulama di wilayah Bone dan Wajo dengan meletakkan wilayah pinggir sebagai salah satu basis studi. Wilayah pinggir dalam hal ini pelabuhan Pallime sebagai gerbang jalur pelayaran, perdagangan orang-orang Bugis Bone, Wajo

dan Soppeng, dan sekaligus mendorong intensitas perjalanan haji di wilayah ini. Aktivitas pelayaran, perdagangan dan perjalanan haji pada akhirnya menjadi aspek fundamental pembentukan jaringan ulama dan transmisi keilmuan Islam di wilayah ini.

Jaringan ulama dan transmisi intelektual Islam pada dasarnya telah mendapat perhatian serius dari berbagai studi sebelumnya. Wahyuddin Halim (2014) secara konsisten melakukan studi mendalam tentang pesantren As'adiyah Sengkang, baik dilihat dari segi peran ulama sebagai aktor, jaringan dan transmisi keilmuan serta aspek budaya literasi dilingkungan pesantren. Kemudian, studi Syamsuddin Arief (2007, 2008) melihat aktor dan jaringan ulama di Sulawesi Selatan 1925-52 juga menempatkan AGH Muhammad As'ad dan Pesantren As'adiyah sebagai poros transmisi intelektual Islam di Sulawesi Selatan. Studi ini mengilhami bahwa untuk melihat jaringan ulama di wilayah Sulawesi Selatan abad ke 20, maka tidak dapat dilepaskan dari pesantren As'adiyah sebagai poros penting. Kemudian studi lebih klasik dilakukan oleh Ridhwan (2006) melihat Pendidikan Islam pada zaman kerajaan Bone dan peran 'qadi' dalam struktur kerajaan Bone. Studi membuka ruang pemahaman transmisi intelektual islam periode awal kedatangan Islam yang berporos di istana.

Membaca studi-studi di atas, nampaknya menempatkan wilayah pusat-pusat kekuasaan dan ulama-ulama besar sebagai sentra transisi keilmuan sebagai basis analisis. Studi ini melihat cara berbeda dengan menekankan pada jaringan ulama dari perspektif pinggiran (*history from the edge*) sebagai basis pembentukan awal jaringan ulama di tingkat lokal pada awal abad ke-20. Oleh karena itu, sinkronitas jaringan ulama dengan perubahan sosial politik mutlak dipahami sebagai kerangka untuk menjawab dari mengapa dan bagaimana wilayah pinggiran tersebut menjadi pintu transmisi keilmuan Islam di tingkat lokal. Studi ini terutama lebih menekankan pada wilayah pesisir utara Bone sebagai pintu masuknya pedagang-pedagang Arab yang membawa serta syiar Islam. Kendatipun bukan merupakan pusat kekuasaan, tetapi wilayah ini penting secara historis dan kultural dalam perkembangan

transmisi intelektual Islam di wilayah sekitar-nya. Konsekuensinya, pembentukan jaringan ulama diletakkan dalam kerangka perkembangan jaringan perdagangan dan pelayaran, perjalanan haji, perubahan politik dan hubungan kekuasaan.

Melihat dari tali temali antara pelayaran, perdagangan, perjalanan haji, transmisi keilmuan, serta eksistensi otoritas lokal, maka studi ini mencoba menurunkan tiga variabel dalam melihat jaringan ulama, *pertama*, Jaringan intelektual. Konteks ini menekankan pada basis keilmuan ulama dan transmisi keilmuan. Kedalaman ilmu seorang ulama pada akhirnya akan teruji dalam melihat dan memecahkan problem-problem keumatan, dan selanjutnya kedalaman keilmuan ini ditransmisikan ke ulama-ulama berikutnya, sehingga nampak sebuah jaringan keilmuan yang berkesinambungan. *Kedua*, jaringan kekerabatan. Kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam melihat struktur sosial, sehingga kekerabatan ulama unsur penting dalam melihat gerakan keagamaan dan perkembangan Islam. Di wilayah Bone dan Wajo, jika dirunut lebih jauh, maka akan nampak sebuah kekerabatan yang bangun oleh ulama bertali temali dengan jaringan intelektual. *Ketiga*, jaringan ekonomi. Jejaring ekonomi memainkan peran penting dalam keberlangsungan dakwah ulama.

Dengan mengambil kasus di wilayah Bone dan Wajo, dan Batasan temporal dari tahun 1900 sampai 1950an, studi ini mencoba meletakkan fleksibilitas jaringan intelektual, ekonomi dan kekerabatan ulama menghadapi berbagai perubahan social politik. Rentang tahun 1900 sampai tahun 1950an, adalah periode yang melintasi tiga rezim berbeda (Hindia Belanda, Jepang, dan Orde Lama). Setiap periode memiliki dinamikanya sendiri. Oleh karena itu Berdasarkan argument di atas, persoalan dalam artikel ini adalah “mengapa dan bagaimana jaringan ulama berubah dan berkembang dari 1900-1950an?” Pokok persoalan ini secara otomatis mengarahkan pada pembahasan trajektori jaringan ulama di Bone dan Wajo. Kemudian pokok persoalan tersebut diturunkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu; bagaimana dan dalam kondisi apa jaringan intelektual, ekonomi dan kekerabatan itu bekerja, dan apakah terjadi tumpang tindih atau saling kait mengait antar

ketiganya? Bagaimana relasi jaringan ulama dengan negara di tengah perubahan social politik dan pergantian rezim yang berbeda?

Artikel ini bertujuan untuk menemukan cara kerja jaringan ulama di wilayah Bone dan Wajo dilihat dari tiga variable; yaitu intelektual, kekerabatan dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis sebagai media untuk memahami perubahan dan perkembangan kehidupan keagamaan masyarakat di Bone dan Wajo. Dengan pemahaman yang memadai akan menuntun pada pengambilan kebijakan yang lebih baik.

METODE

Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan melihat jaringan ulama dengan pendekatan ilmu sejarah dengan menganalisis secara sinkronis sehingga menemukan pola dari fenomena jaringan ulama di Bone dan Wajo yang berubah, berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode sejarah

Untuk melihat terbentuknya jaringan intelektual ulama, kekerabatan dan ekonomi, maka pendekatan akses penting dilakukan untuk menemukan bagaimana jaringan itu terbentuk, berubah dan berkembang. Nancy Lee Peluso dan J.C. Ribot melihat bahwa terdapat semacam jaringan akses yang menghubungkan pada sumber daya. Akses secara empiric berfokus pada siapa mendapat apa, dan dalam cara apa, serta kapan (Peluso and Ribot 2003: 68). Perkembangan jaringan intelektual, kekerabatan dan ekonomi ulama itu pula tidak dapat dilepaskan dari ruang akses yang melingkupinya. Akses kemudian semakin solid ketika terdapat insitusi yang mengontrol sumber daya. Akan tetapi, akses ini kemudian dapat berubah pola, berkembang dengan jejaring-jejaringan ditentukan kapasitas actor yang mempengaruhi praktis dan ide-ide atau gagasan. Dalam konteks ini, ulama yang berkiprah antara tahun 1900 sampai 1950an dalam studi ini adalah aktor yang memberi peran penting dalam perubahan dan perkembangan akses dan jaringan Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

1. Pembentukan Akses dan Jaringan Ulama

a. Geo-Historis

Secara geografis, Bone dan Wajo merupakan dua wilayah dengan karakteristik topography yang berbeda. Wilayah Bone dengan jalur pantai terpanjang dan gugusan pegunungan di wilayah Barat yang berbatasan dengan Soppeng dan Wajo. Sementara Wajo memiliki garis pantai relatif lebih sedikit daripada Bone. Akan tetapi topography pegunungan dan danau mendominasi wilayah Wajo. Kedua wilayah ini kemudian terhubung dengan aliran sungai Cenrana yang berhulu di danau Tempe dan bermuara di teluk Bone. Transportasi melalui air kemudian yang mengintegrasikan kedua wilayah ini. Dalam sejarahnya, Wajo dan Bone juga pernah melakukan perjanjian persekutuan. Pada 1582, Kerajaan Bugis, Kerajaan Wajo dan Kerajaan Soppeng bergabung dengan Kerajaan Bone dengan membuat perjanjian pertahanan bersama yang disebut Perjanjian *Lamungpatue ri Timurung*. Ketiga kerajaan itu kemudian membentuk aliansi yang disebut *Tellu Poccoe* atau “Tiga Puncak Kerajaan Terbesar” untuk menghadapi ancaman agresi Kerajaan Makassar (Gowa-Tallo) (Mappangara 2004: 474). Dengan terbentuknya aliansi *Tellu Poccoe*, maka terdapat dua kekuatan yang mengendalikan kekuasaan politik di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Gowa yang berpengaruh dikalangan orang-orang Makassar dan Kerajaan Bone yang berpengaruh di kalangan orang-orang Bugis. *Tellu Poccoe* dalam istilah bahasa Bugis yang artinya, *tellu* artinya tiga, *poccoe* artinya puncak. Penggabungan dua suku kata bahasa Bugis tersebut dapat bermakna tiga puncak. Tiga puncak yang dimaksud adalah bergabungnya tiga kerajaan terbesar, yakni Kerajaan Bone, Kerajaan Soppeng dan Kerajaan Wajo.

Raja Gowa pada masa itu Tunijallo, memandang aliansi *Tellu Poccoe* sebagai ancaman langsung terhadap supremasi Kerajaan Gowa yang bertahan sejak lama. Hal ini lebih diperburuk lagi karena Kerajaan Wajo dan Soppeng yang masih ada dalam pengaruh Kerajaan Gowa, ikut bergabung dalam aliansi

itu. Karena itu, kedua kerajaan tersebut dianggap sebagai kerajaan-kerajaan bawahan yang melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Kerajaan Gowa. Bagi Kerajaan Gowa aliansi baru yang dibuat oleh Kerajaan Bone bagai memukul gendang perang terhadap Kerajaan Gowa.

Persekutuan ini terjalin dengan baik sampai masuknya agama Islam. Perbedaan pandangan pada awal kedatangan Islam menjadikan perjanjian *tellu poccoe* mengalami kelonggaran. Kerajaan Wajo dan Soppeng terlebih dahulu menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan. Sedangkan Kerajaan Bone menolak dengan tegas kedatangan agama Islam. Sumber lain menyebutkan bahwa secara pribadi raja Bone menerima Islam sebagai agama baru. Menurut Mappangara dan Abbas (2003: 100) “Setelah kerajaan Sidenreng, Soppeng dan Wajo menerima Islam, raja Bone X (1602-1611) We Tenrituppa (perempuan) menerima Islam secara diam-diam, dia berangkat ke Sidenreng memeluk agama Islam”, dan raja Bone ini kemudian meninggal di Sidenreng. “Pada waktu itu kerajaan Bone masih merupakan penentang utama seruan dari kerajaan Gowa. Itulah sebabnya Raja Bone X kemudian digelar oleh masyarakat *Matinroe ri Sidenreng* (Raja yang meninggal dunia di Sidenreng)” (Abidin 1999: 232) Pada 1611, kerajaan Gowa berhasil menaklukkan Kerajaan Bone dengan dalih penyebaran syariat Islam. Kerajaan Bone secara resmi menyatakan menerima Islam. Sejak itu seluruh kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, kecuali Toraja, telah menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan.

b. Akses Pendidikan Islam

Transmisi keilmuan Islam di Bone dan Wajo telah berlangsung sejak agama Islam resmi menjadi agama kerajaan. Pada masa kerajaan, keberadaan dan maju mundurnya kegiatan pendidikan Islam di daerah ini sepenuhnya tergantung pada perhatian yang diberikan kerajaan. Pada awal kedatangan Islam, Kerajaan Bone merupakan kerajaan yang paling memiliki minat besar dalam mempraktekkan ajaran Islam. Menurut Mattulada bahwa setahun kemudian raja Bone Latenripala menerima Islam sebagai agama resmi kerajaan

Bone, ia berangkat ke Gowa mempelajari agama Islam pada Khatib Tunggal Dato' ribandang. Raja Bone, Latenripala diberi gelar Sultan Abdullah. Tiap tiga tahun sekali raja Bone bersama orang-orang terkemuka kerajaannya melakukan perjalanan ke Gowa. Di samping urusan kenegaraan, juga untuk memperdalam ilmu agama Islam (Mattulada 1983: 246).

Setelah Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan, sistem kenegaraan mengalami perubahan. Otoritas kerajaan mengangkat pejabat-pejabat yang bertujuan mengurus masalah keagamaan, sering diistilahkan pejabat *sara'*. Para pejabat *sara'* juga berasal dari keluarga bangsawan sehingga mendapat gelar bangsawan seperti; *Petta Kalie*, *Petta Imang* dan lain-lain. Istilah *petta* merupakan suatu panggilan kepada bangsawan, sedangkan *kali* adalah jabatan tertinggi dalam pejabat *sara'* (sinonim dengan kadi = hakim). Kemudian *imang* adalah Imam Masjid. Demikian dari empat unsur pangaderan; "(1) *ade*, (2) *bicara*, (3) *rapang*, (4) *wari'* menjadi lima, dengan (5) *sara'* ke dalamnya." (Mattulada 1989: 147)

Ade' adalah salah satu aspek *pangadereng*, yang pengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan orang Bugis. (Mattulada, 1985: 342. Konsep ini mengandung arti bahwa *ade'* merupakan kongkritisasi atau perwujudan dalam segenap tata tertib yang meliputi semua orang dalam besikap dan bertindak dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Sedangkan *bicara* adalah semua keadaan yang bersangkut paut dengan masalah peradilan. Dengan demikian maka *bicara* itu adalah aspek *pangadereng* yang mempersoalkan hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum interaksi kehidupan dalam masyarakat. Ia mengandung aspek-aspek normatif dalam mengatur tingkah laku setiap subyek hukum. Kemudian, *rapang* mengokohkan negara. Kata *rapang* disebut juga sebagai salah satu sendi *pangadereng*".

Rapang menurut fungsinya terbagi atas tiga; 1) sebagai katalisator, seperti undang-undang ia menjaga ketetapan-ketetapan, keseragaman dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari waktu yang lalu sampai masa kini dan masa depan, 2) bahan

perbandingan, dalam keadaan tidak ada atau belum ada norma-norma atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu, maka *rapang* berfungsi membanding atas suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi, atau semacam yurisprudensi, 3) alat pelindung yang berwujud dalam pamali-pamali atau *paseng* atau sejenis ilmu gaib penolak bala. Kemudian, *Wari* adalah perbuatan *mappasilaingeng* (membedakan)". Dalam kehidupan kenegaraan *wari* berfungsi sebagai pranata yang menata negara. Setelah Islam masuk dan menjadi agama resmi kerajaan, keempat unsur *pangadereng* itu menjadi lima, yakni ditambah *sara'* (Mattulada 1985: 342-80).

Dengan diterimanya *sara'* (syariat Islam) ke dalam *pangadereng*, maka pranata-pranata kehidupan sosial budaya orang Bugis yang tumbuh dari aspek-aspek *pangaderang*, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas. *Sara'* sebagaimana adanya yang sampai pada kehidupan orang Bugis menjadi pandu atau terintegrasi sebagai aspek *pangadereng* lainnya. Dengan perubahan ini, maka merubah pula struktur kerajaan. Pejabat kerajaan ditambah satu yakni pejabat *sara'*. Pejabat *sara'* mengatur urusan upacara-upacara keagamaan, seperti Maulid, Isra dan Mi'raj dan Ied dan di Istana Raja. Mereka sangat berperan dalam urusan pernikahan raja-raja dan kaum bangsawan lainnya, serta penyelenggaraan upacara-upacara kematian dan pembesar kerajaan lainnya.

Jika diurut ke belakang, ketika Islam diterima sebagai agama resmi di wilayah Kerajaan Bugis; Bone dan Wajo, nyaris tidak ditemukan soal yang muncul dalam relasi antara negara (kerajaan) dan agama. Sistem kenegaraan juga mengalami perubahan. *Bissu* yang dikenal sebagai figur spiritual digantikan oleh ulama yang mengurus masalah keagamaan, sering diistilahkan pejabat *syara'*. Pejabat *syara'* menjadi aktor yang menentukan perkembangan dan akses Pendidikan Islam atau dengan kata lain pejabat *syara'* menjadi institusi yang dapat mengontrol sumber daya. Sebagai institusi yang mengontrol sumber daya, maka para pejabat *syara'* juga cenderung berasal dari keluarga bangsawan sehingga mendapat gelar bangsawan seperti; *Petta Kalie*,

Petta Imang dan lain-lain. Isitlah *petta* merupakan suatu panggilan kepada bangsawan, sedangkan *kali* adalah jabatan tertinggi dalam pekabat *sara'* (sinonim dengan kadi = hakim). Kemudian *imang* adalah Imam Masjid. Demikian pula dari empat unsur pangaderan; “(1) *ade*, (2) *bicara*, (3) *rapang*, (4) *wari'* menjadi lima, dengan (5) *sara'* ke dalamnya (Sulaeman 2004).

Oleh karena agama telah menjadi urusan negara (kerajaan), maka perangkat-perangkat dan tata kelola pembiayaan juga diatur oleh kerajaan. Pemerintah kerajaan memberikan tanah-tanah *akkinandreang* (biaya hidup) kepada imam dan perangkat-perangkat masjid lainnya juga berhak memungut sumbangan yang dijalankan pada hari-hari tertentu. Akan tetapi, seorang Imam juga berkewajiban mengajarkan ilmu agama di masjid-masjid dengan sukarela, menjadi panutan bagi masyarakat, dan menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan.

Sejak itu urusan agama dan politik pemerintahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga dengan sendirinya jabatan keagamaan dan struktur kerajaan itu menjadi jabatan politis. Akibatnya, kepentingan untuk meneruskan atau mewariskan pengetahuan keagamaan juga menjadi urusan kerajaan. Pemerintah kerajaan berkewajiban mempersiapkan jabatan kadi. Pada periode ini, akses atas Pendidikan keagamaan berada dalam lingkaran elit. Jika dirunut jauh ke belakang jabatan kadi memiliki akar genealogis yang kuat. Hal ini terkait dengan akses terhadap pendidikan yang berada dalam lingkup kekerabatan. Dalam catatan Gervaise pada abad ke 17, anak-anak bangsawan di wilayah Bugis-Makassar setelah menginjak usia 7 atau 8 tahun telah diajarkan membaca Al-Qur'an oleh seorang Guru yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji (Abidin 1983: 36). Pada periode ini, perjalanan ibadah haji umumnya dalam rangka menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, sebutan haji juga diasumsikan sebagai ulama (Azra 1994; Putuhena 2007). Oleh Ridhwan (2006: 66) menyebutkan bahwa haji yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak bangsawan itu mengacu pada seorang kadi karena hanya kadilah yang bertugas mengajarkan ilmu agama

di lingkungan istana untuk dipersiapkan menjadi kadi berikutnya.

Seperti halnya AGH Muhammad Rafi Sulaeman, adalah masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan istana Kerajaan Bone, mendapatkan ilmu agama sejak usia dini melalui orang tuanya, AGH Sulaeman (kadi kerajaan Bone ke 18 tahun 1946-1951). Kemudian AGH Muhammad Rafi Sulaeman berangan ke Mekkah pada usia 17 tahun untuk menempuh pendidikan agama sebagai persiapan untuk menjadi Kadi. Dan setelah menjadi Kadi, AGH Rafi Sulaeman kembali meneruskan tradisi transmisi Islam yang dijalankan oleh kadi-kadi sebelumnya dengan mengajarkan ilmu agama di Masjid. Jika ditelusuri jaringan genealogis kekadian, maka akan tampak sebuah jaringan kekerabatan yang besar yang berporos pada lingkaran kerajaan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari akses Pendidikan agama juga yang lebih dikuasai oleh kalangan istana. Oleh karena itu, ulama-ulama yang muncul kemudian, khususnya di wilayah Bone tidak dapat dilepaskan dari jaringan kekerabatan yang kuat.

Ketika ulama menjadi kelompok elite yang dekat dengan istana (kerajaan), maka ulama semakin memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan keagamaan masyarakat. System sosial-politik yang berpusat pada raja semakin memperkuat keberadaan dan otoritas ulama di tengah masyarakat. Ulama bertindak tidak hanya sebagai penerjemah nilai-nilai Islam dalam masyarakat, tetapi sekaligus tampil sebagai elite kebesaran kerajaan (Burhanuddin 2003; Hooker 2003). Pada sisi lain, relasi antara negara dan ulama memagari transmisi keilmuan di lingkungan istana, tetapi juga mempercepat proses islamisasi karena mendapat dukungan dan proteksi dari otoritas lokal.

c. Jaringan dan Transmisi Keilmuan

Christian Pelras (2000) membuat argumentasi yang menarik tentang *patron-client* di Sulawesi Selatan dengan menempatkan posisi ulama setara dengan bangsawan. Argumentasi ini bukan tanpa alasan, menurut Pelras lagi, bahwa sejak agama Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan, terdapat upaya dari kaum bangsawan menggabungkan karisma kebangsawanan dengan ke-Ulamaan (Pelras

2006: 161). Hal ini kemudian membentuk jaringan dan transmisi intelektual Islam terpagari, hanya dapat diakses di lingkungan elite kerajaan.

Berdasarkan argument historis di atas, maka dapat dikatakan bahwa jaringan intelektual, transmisi keilmuan, dan sumber daya kelangsungan transmisi keilmuan tersebut dikontrol oleh insitusi negara melalui pejabat *syara'*. Mobilitas keilmuan bergerak secara vertikal. Terdapat elitisasi dan eksklusifitas ulama dengan munculnya defenisi baru yang menyatukan antara gelar bangsawan dengan ulama, seperti *petta kalie*, *petta imam*, dan lain sebagainya. Para bangsawan senantiasa berupaya meningkatkan martabat dengan menggabungkan keistimewaan yang mereka peroleh dari tatanan agama Islam dengan memonopoli jabatan-jabatan keagamaan sambil tetap mempertahankan prestise yang sejak lama mereka peroleh sebelum Islam (Pelras 2006: 161). Dalam berbagai kasus, jika terdapat seorang ulama tidak berasal keturunan bangsawan atau berasal dari negeri Arab, maka para otoritas atau penguasa lokal kemudian menganugerahkan gelar bangsawan kepada ulama tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa penguasa lokal atau bangsawan begitu antusias menyandingkan gelar bangsawan dengan ulama. Nampaknya terdapat semacam keceemasan para bangsawan akan tergerus oleh karisma ulama.

Walaupun transmisi intelektual Islam terpagari di lingkungan elite kerjaan, agama Islam tetap terus berkembang dan diterima sebagai agama sosial. Pemahaman ajaran Islam yang elegatarian lambat laun diterima oleh putra-putri bangsawan yang benar-benar mendapat pendidikan agama Islam. Sehingga pada perkembangan berikutnya, terdapat keluarga bangsawan memilih menjadi ulama dan membuang segala atribut kebangsawanan-nya. Seperti dalam tradisi lisan dikisahkan seorang keturunan Arung Mampu membuang segala atribut kebangsawannya dan memiliki berangkat haji dan menetap beberapa lama di Mekah untuk belajar agama, serta beragam lagi kasus-kasus lainnya ulama yang masih memiliki darah bangsawan kemudian meninggalkan atribut kebangsawannya.

2. Transmisi Keilmuan dan Perluasan Jaringan

Menurut Dhofier (1984: 21) bahwa dalam melestarikan dan mempertahankan tradisi pesantren adalah membangun sosialisasi dan kerjasama dengan tiga cara, yaitu: a) mengembangkan tradisi bahwa keluarga yang terdekat harus menjadi calon kuat pengganti kepemimpinan pesantren; b) mengembangkan suatu jaringan perkawinan endogamous antara keluarga kiai; dan c) mengembangkan tradisi transmisi pengetahuan dan transmisi mata rantai intelektual antara sesama kiai dan keluarganya. Namun dalam pandangan Syamsuddin Arief (2007, 2008) menekankan bahwa proses terbentuknya jaringan pesantren di Sulawesi Selatan abad 20 terjadi melalui relasi intelektual dan relasi horizontal sesama guru dan murid. Namun, dalam perkembangan jaringan intelektual itu, menurut Arief, jaringan kekerabatan kiai pesantren tidaklah menjadi membentuk poros di Sulawesi Selatan. Nampaknya studi Syamsuddin Arief tidak melihat pada akses atas jaringan itu sendiri yang pada dasarnya bertumpuh pada jaringan kekerabatan. Sementara itu, temuan dalam studi ini memperlihatkan adanya jaringan kekerabatan yang bertali temali dengan jaringan intelektual. Hal ini akan Nampak jika dilihat dengan pendekatan akses terhadap Pendidikan terutama pada pembentukan awal jaringan intelektual ulama. Akan tetapi pada periode berikutnya, akses melonggar sehingga memberi kesempatan kepada masyarakat dalam berbagai level menempuh Pendidikan agama Islam.

3. Dari Halaqah ke Madrasah: Perubahan Akses dan Perkembangan Jaringan

Tampilnya ulama pada dekade-dekade awal abad ke 20 dalam mengtransmisikan pemahaman keagamaan tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial politik dalam konteks lebih luas. Dalam studi Robert van Niel (2009) menemukan bahwa perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda melalui politik etis pada akhirnya melahirkan elite modern terpelajar di Indonesia. Akan tetapi, elite modern itu sendiri pada dasarnya tidak melulu merupakan produk dari Pendidikan colonial,

boleh jadi elit modern dalam konteks ulama yang berbasis pemahaman intelektual Islam justeru bersumber dari respon dan bahkan resistensi atas Pendidikan kolonial. Seperti disebutkan dalam studi Graves (2007) yang mengambil kasus masyarakat Minangkabau Bukit Tinggi menemukan bahwa kebijakan pendidikan kolonial direspons secara positif masyarakat Minangkabau di Bukit Tinggi dengan mendirikan sekolah-sekolah Islam dengan system klasikal seperti yang dipraktekkan dalam Pendidikan kolonial. Akibatnya, elite modern Islam juga menjadi fenomena baru dalam struktur masyarakat Hindia Belanda. Bahkan semangat pengembangan pencarian ilmu Islam semakin menguat seiring dengan semakin terbukanya jalur transportasi laut, terutama setelah terbukanya terusan Suez.

Terusan Suez menjadi lokasi sentral yang mampu memperpendek jarak mobilisasi ekspor barang-barang dari nusantara, menggeser jalur pelayaran nusantara-Eropa melalui tanah Arab. Perbaikan sistem perkapalan semakin mendukung keadaan ini. Konsekuensinya, disamping ekonomis, semakin banyak pribumi yang meninggalkan nusantara untuk berhaji. Tercatat, pada 1907 jumlah jemaah haji dari Indonesia mencapai 91.000 orang, jumlah terbanyak yang tercatat sepanjang tahun 1853 sampai 1935. Haji tidak hanya menjadi bagian dari pengembangan mencari ilmu agama, tetapi juga berfungsi sebagai pemersatu nusantara dan perangsang anticolonialisme (Bruinessen 2005: 15). Kehidupan Islam di Sulawesi Selatan kemudian berkembang dengan ciri keislaman yang kuat.

Gayung bersambut dengan kondisi di atas, jalur laut wilayah pesisir utara Bone melalui sungai Cenrana dan bermuara di pelabuhan Pallime juga mengalami perkembangan pesat (Pelras 2006: 74). Pedagang-pedagang Arab mulai ramai di wilayah ini sehingga sampai akhir abad ke 19, telah terdapat perkampungan-perkampungan Arab di daerah Pallime dan sekitarnya. Pada periode ini juga, pelabuhan Pallime kedatangan orang-orang Arab yang merupakan rombongan Syekh Muhammad Assyafi. Oleh masyarakat lokal menyakini bahwa Syekh Muhammad Assyafi

adalah masih kerabat dari Syarif Husain Bin Ali, Gubernur Mekah. Kedatangan Syekh Muhammad Assyafi berkaitan dengan situasi politik di Arab (Idrus Husein, *Wawancara* 7 Agustus 2018). Pemerintah Kerajaan kemudian memberi posisi penting dan hak-hak khusus di pelabuhan Pallime. Keadaan ini juga mendorong perjalanan lebih intensif lagi orang-orang Bugis di wilayah pesisir Bone melakukan perjalanan haji dan sekaligus belajar agama di Mekah. Tradisi belajar agama kemudian berkembang di wilayah ini.

Keadaan ini menjadi lebih dinamis setelah gejolak gerakan pembaharuan Islam dan revolusi Arab, yang merembes di wilayah Nusantara. Pada saat yang sama, akses Pendidikan agama Islam bergeser, tidak hanya menyentuh lapisan bangsawan, tetapi juga kepada kelas menengah (pedagang) terutama bagi mereka memiliki akses ekonomi yang cukup dalam perjalanan haji.

Pada saat yang sama, tradisi belajar agama di Mekah juga berkembang di wilayah Wajo. AGH Muhammad As'ad atau lebih dikenal Gurutta Sade As'ad adalah ulama termasyhur dan pelopor solidnya jaringan ulama di Sulawesi Selatan. AGH Muhammad As'ad memperoleh ilmu di Harmain, pusat intelektual dunia Islam. Pertama-pertama, ia menimba ilmu al-Qur'an, Nahwu, dan Sharaf pada ayahnya, Syekh Abdul Rasyid. Meskipun belum ada informasi yang menyebutkan siapa AGH. Abdul Rasyid, tetapi besar kemungkinan AGH. Abdul Rasyid berguru pada ulama Haramain akhir abad ke-19. Pada saat itu, ulama Jawi Syekh Nawawi al-Bantani (1813-1897) dan Syekh Ahmad Khatib al-Sambassudah menjadi guru utama bagi komunitas Jawi di Haramain. (Arief 2007). AGH Muhammad As'ad terlahir dari kerabat ulama Bugis kemudian membentuk jaringan di Sulawesi Selatan pada abad ke 20.

Perkembangan haji nampaknya berjalan beriring dengan transisi keilmuan melalui masjid-masjid di tingkat lokal. Di wilayah Wajo dan Bone telah marak pengajian-pengajian kitab di masjid-masjid. Mereka yang mengajar umumnya telah belajar di Mekah maupun hasil dari kaderisasi halaqah di tingkat local. Seperti, di wilayah Bone, pengajian

halaqah atau *mengaji tudang* ada decade pertama abad ke 20 imam-imam yang telah belajar agama baik di Mekah maupun di tingkat local telah mengajarkan agama Islam di Masjid. Antara lain; Haji Bustaming di Masjid Kajuar, Haji Mekka di Masjid Cenrana, Haji Sulaeman di masjid Bone. Haji Daud di Masjid Pattiro, dan lain-lain sebagainya. Secara tradisional, imam-imam ini telah mentransmisikan pemahaman Islam dalam masyarakat.

Transmisi pemahaman keagamaan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya jaringan ulama, baik yang berkaitan dengan Timur Tengah (Mekah) maupun ulama lokal yang tersebar di wilayah Bone dan Wajo. Pada periode awal abad ke 20, masjid-masjid menjadi media penting dalam transmisi intelektual Islam. Bahkan, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi telah menjelma sebagai media transmisi dan penyebaran Islam dan penguatan ekonomi melalui partisipasi masyarakat. Dalam studi Muhammad Ali yang melihat transmisi keilmuan Islam di Klantan memperlihatkan adanya kesamaan dengan dinamika lokal di Klantan. Secara ilmiah jaringan di Kelantan selama abad-abad ini terkait erat tidak hanya dengan Timur Tengah (Mekah dan Mesir), tetapi juga ke Asia Selatan (India dan Pakistan). Ulama lokal menjadi penyebar Islam melalui pembentukan surau, pondok dan madrasah. Implikasinya adalah bahwa guru (ulama) paling berpengaruh dalam penyebaran pengetahuan Islam di Kelantan (Ali 2006: 39-56). Hal ini dapat juga dijumpai dalam melihat transmisi intelektual Islam di Bone dan Wajo pada awal abad ke 20.

Melihat perkembangan jaringan intelektual Islam di Nusantara yang dapat mengancam eksistensi Hindia Belanda, pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah keagamaan. Negara Kolonial Belanda mengontrol kegiatan keagamaan, seperti shalat Jumat, zakat, naik haji dan perkawinan. Pada tahun 1905 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *ordonantie* ten-tang pengawasan sekolah-sekolah (pesantren) yang hanya memberi pelajaran agama Islam. Kendatipun peraturan dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum, tetapi memperlihatkan pengawasan yang

ketat. Bahkan pada perkembangan berikutnya, pemerintah juga mengeluarkan *Guru Ordonantie* 1925 (staatblad 1925 No. 219) yang bertujuan mengawasi para guru-guru yang mengajarkan agama Islam (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 745).

Masalah haji merupakan masalah krusial bagi pemerintah Belanda. Pada satu sisi, *ordonantie* yang mengatur masalah-masalah agama menganut prinsip *religious neutrality*, sementara urusan haji cenderung dilihat tidak hanya urusan ibadah semata, tetapi dapat memiliki dampak yang lebih luas menyangkut masuknya ideologi global melalui perjalanan haji, seperti gerakan Pan Islamisme, munculnya imajinasi kebangsaan, yang kesemuanya dapat mengancam eksistensi pemerintah. Pemerintah Belanda tidak melakukan pelarangan perjalanan haji, bahkan memperbolehkan berangkat secara rombongan. Akan tetapi, pemerintah tidak akan memberi bantuan jika terjadi masalah-masalah selama menunaikan ibadah haji (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 745). Kemudian, administrasi melalui pencatatan haji cukup ketat. Seperti dalam kasus tahun 1938, terdapat 23 orang tua dan 6 anak-anak di daerah Wajo yang berangkat haji. Setelah kembali dari Mekah mereka menghadap ke Pemerintah Hindia Belanda melalui perwakilan di kepala wanua. Orang-orang yang berangkat dan kembali terregistrasi dengan baik (Arsip Pemerintah Daerah Wajo Reg. 102). Kendatipun demikian, orang-orang Bugis tetap melakukan perjalanan haji dalam jumlah cukup banyak. Sebagian dari mereka kemudian menetap untuk sementara waktu untuk belajar agama.

Control negara atas agama juga nampak pada pelaksanaan shalat jumat. Walaupun tidak secara implisit disebutkan dalam *ordonantie*, tetapi dalam pelaksanaannya shalat jumat mendapat perhatian dari pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan. Masjid-masjid yang boleh melaksanakan shalat jumat telah mendapat izin dari pemerintah. Seperti dalam kasus permohonan K. H. Abdullah dan Ahmad Makkarusu, pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Pada tanggal 30 Agustus 1935 atas nama keduanya mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Selatan untuk mendapat izin

melaksanakan shalat jumat di Masjid Lajjowa, Soppeng. Surat permohonan ini adalah menanggapi tanggapan pemerintah yang menolak permohonan organisasi Muhammadiyah di Watansoppeng (Arsip Pemerintah Daerah Bone Reg. 604).

Dinamika lokal dan global nampaknya tidak dapat diabaikan dalam memeriksa jaringan ulama di Sulawesi Selatan. Gerakan pembaharuan Islam dan gerakan-gerakan keagamaan lainnya menjadi pernak-pernik dalam melihat dinamika jaringan ulama dan relasinya dengan negara. Pada Oktober 1931, Raja Bone Sultan Ibrahim Andi Mappayukki memprakarsai Musyawarah Alim Ulama Sulawesi Selatan untuk membahas persoalan-persoalan keagamaan, seperti munculnya gerakan pembaharuan Islam, Muhammadiyah, gerakan tarekat di wilayah Bone. Hadir dalam musyawarah itu, antara lain; Sayyid Abdullah Dahlan dari Garut, pemangku Imam Syafii di Mekah, Syekh Muhammad Rauf-Syekh Madinah, Haji Abdul Hamid, Kadi Bone, Haji Muhammad Ramli, Kadi Palopo, Haji Husain Bin Umar Bone, Syekh Haji Muhammad As'ad Mudir MAI Sengkang Wajo, Syekh Hasan Amudi Parepare, syekh Muhammad Yafii, Guru Agama, Haji Bustaming, Imam Kajuara, Haji Mekka, Imam Cenrana, Haji Sulaeman, Imam Bone, Haji Yunus, Imam Macege, Haji Daud, Imam Pattiro, Haji Muhammad Said, Ulama Bajoe Bone, Haji Muhibuddin, Ulama Wajo, Haji Surur Imam Pompanua Bone, Haji Abbas Imam Maroanging Wajo, Haji Badawi Imam Salomekko Bone, Haji Muhammad Thahir Kadi Balanipa, Haji Asan-Kadi Sinjai, Haji Umar Imam Langkero Bone, Haji Abdullah Ulama Lamuru Bone, Haji Abdul Wahid Imam Tanete Riawa Barru, haji Usman Kadi Soppeng, dan Haji Jamal kadi Rappang (Walinga 2018: 51).

Hasil pertemuan alim ulama tersebut menghasilkan lima rekomendasi. *Pertama*, mengembangkan Pendidikan Islam melalui madrasah, disamping melanjutkan usaha ulama yang masih ada dengan pengajian system tradisional. *Kedua*, madrasah mendapat dana pengembangannya dari sumber-sumber zakat fitrah dan harta dari masyarakat. *Ketiga*, madrasah bebas dari segala aliran politik, tidak

menekankan ikatan pada salah satu mazhab. *Keempat*, madrasah yang berkembang dapat membuka cabang dimana saja, atas permintaan masyarakat, dan *kelima*, para ulama menghindari sejauh mungkin persengketaan dalam perkara hilafiah (Mattulada 1983: 88). Selain membahas pengembangan transmisi keilmuan Islam melalui madrasah, pertemuan alim ulama tersebut juga membahas tentang masalah-masalah keagamaan yang berkembang dalam masyarakat, termasuk munculnya berbagai tarekat. Salah satu paling mendapat perhatian adalah Tarekat Haji Abdullah bin Abdurrazak. Hasil pertemuan ini juga menghasilkan fatwa bahwa tarekat Haji Abdullah bin Abdurrazak dinyatakan sesat (Arfah and Amir 1993: 116-17).

Jika dilihat dari latar belakang intelektual ulama-ulama yang hadir dalam musyawarah di atas nampaknya mereka berasal dari jaringan intelektual yang sama dan mencoba merumuskan masalah yang dihadapi dalam kehidupan keagamaan. Dalam pertemuan inilah gagasan-gagasan AGH Muhammad As'ad yang mengambil jalan tengah dalam memecahkan masalah keagamaan. Tercermin dalam gagasannya antara lain; Mengembangkan Pendidikan Islam melalui madrasah disamping melanjutkan usaha-usaha ulama dengan system tradisional; madrasah dibangun dibesarkan melalui zakat fitrah dan zakat harta dari masyarakat. Madrasah bebas dari kepentingan aliran politik dan tidak menekankan pada salah satu mazhab; madrasah yang sudah berkembang membuka cabang-cabangnya atas permintaan masyarakat setempat, dan para ulama sedapat mungkin menghindari pertentangan khilafiah (Walinga 2018).

Melihat hasil dari pertemuan alim ulama tersebut, nampaknya lebih banyak didominasi dari gagasan-gagasan AGH. Muhammad As'ad. Gagasan AGH Muhammad As'ad ini juga dipraktekkan dalam mengembangkan MAI Sengkang (sekarang Pesantren As'adiyah). Hal ini kemudian terbukti bahwa Pesantren As'adiyah merupakan poros pembentukan jaringan ulama di Sulawesi Selatan. Hampir setiap masjid-masjid di wilayah Bone, Wajo dan Soppeng berhulu pada Pesantren As'adiyah Sengkang. Perkembangan jaringan intelektual tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan pesantren yang berhulu pada MAI Sengkang.

MAI Sengkang periode pertama (1930-1952) dipimpin oleh Anre Gurutta H. Muhammad As'ad. Dari sinilah jaringan intelektual ditingkat lokal, terutama wilayah Bugis berkembang dengan pesat. AGH. Muhammad As'ad kemudian menjadi kiblat intelektual dari ulama-ulama di tanah Bugis. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat perkembangan pesantren di berbagai tempat di Sulawesi Selatan. Murid-murid dari AGH. Muhammad As'ad kemudian melanjutkan transmisi intelektual dengan pendirian pesantren baru atau mendirikan cabang-cabang MAI di berbagai daerah.

Kemudian, hasil pertemuan alim ulama tersebut juga direspon oleh Andi Mappayukki Sultan Ibrahim (raja Bone 1905-1946). Andi Mappayukki begitu antusias dalam perkembangan transmisi keilmuan Islam dengan mendatangkan Assyech Abdul Aziz Asysyimie, seorang ulama berasal dari Cairo, Mesir. Bersama ulama-ulama lokal, pemerintah Kerajaan Bone kemudian mendirikan sekolah Pendidikan Islam Madrasah Amiriah di Watampone. Sekolah ini dikelola Assyech Abdul Aziz Asysyimie dan dibantu oleh Ustaz Abdul Hamid Al Misyrie, yang selanjutnya menjadi pimpinan madrasah. Madrasah Amiriah Watampone pernah juga dibawah pimpinan Asyayech Mahmud Al Jawab yang didatangkan dari Palopo. Asyayech Mahmud Al Jawab adalah mufti dari Madinah yang melarikan diri ke Indonesia karena pergolakan politik. Pada masa pendudukan Jepang, madrasah ini terpaksa ditutup, baru dibuka kembali pada tahun 1946. Dalam perkembangan selanjutnya Madrasah Amiriah Bone mengalami beberapa kali perubahan yakni pada tahun 1952 diubah menjadi Sekolah Menengah Islam dan tahun 1954 diubah lagi menjadi PGAP (Pendidikan Guru Agama Pertama) yang terdiri atas PGAP putra dan putri (Pawiloy 1981: 85-86).

Akan tetapi, Madrasah Amiriah Watampone tidak berkembang dengan baik dibandingkan dengan perkembangan Madrasah Arabiyah Islamiyah Sengkang. Hal ini disebabkan karena Madrasah Amiriah mendapat dukungan finansial dari raja Bone, Andi Mappayukki. Ketika situasi politik tidak stabil, seperti periode pendudukan Jepang, sampai

periode revolusi, madrasah Amiriah tidak berkembang dengan baik karena terkendala pada persoalan pendanaan. Sementara Madrasah Arabiyah Islamiyah yang kelak berubah menjadi pesantren As'adiyah berkembang dengan pesat. Pesantren As'adiyah dengan basis kultural dan mendapat campur tangan pemerintah kerajaan dalam pengelolaannya lebih dapat bertahan dari berbagai periode krisis. Jaringan intelektual yang telah dibangun oleh AGH. Muhammad As'ad yang menghubungkan dengan imam-imam masjid local khususnya di wilayah Bone, wajo dan Soppeng menjadi modal ketahanan kultural yang sangat solid.

Perkembangan jaringan intelektual yang dibangun AGH Muhammad As'ad tidak terlepas juga dari strategi komunikasi yang fleksibel, mudah diterima dan menarik. Kepiawaian AGH Muhammad As'ad dalam membangun komunikasi sehingga mendapat proteksi dari otoritas lokal. Dalam studi Wahyuddin Halim (2014) yang melihat peran AGH Muhammad As'ad dan Pesantrennya (As'adiyah) dalam mengembangkan literasi Bahasa Bugis. Halim melihat satu sisi dari yang menarik peran Pesantren As'adiyah dalam mempertahankan literasi Bahasa Bugis. Kepiawaian AGH Muhammad As'ad dalam bahasa Bugis yang tinggi menjadi Bahasa pengantar dalam mentransmisikan ilmunya sehingga mampu menarik perhatian dan menyentuh lapisan masyarakat Bugis. Penggunaan Bahasa Bugis telah menjadi pondasi penting dalam membangun jaringan intelektual ulama yang solid di wilayah Bugis.

Untuk melihat tradisi keilmuan di pesantren, maka penting menelusuri dan memeriksa kitab kuning yang digunakan. Pendekatan *inter-textuality* ini penting untuk menelusuri jaringan intelektual. Jaringan kitab kuning yang bersumber dari Pesantren As'adiyah hampir semuanya diajarkan secara seragam di berbagai pesantren di Sulawesi Selatan, kendatipun tidak kesepakatan sebelumnya dengan para pengelola pesantren. Nampaknya, jaringan kitab kuning yang dibangun oleh AGH Muhammad As'd menjadi panutan yang diikuti oleh para pendiri pesantren di Sulawesi Selatan. Kondisi ini mungkin dapat dijelaskan dengan jaringan ideologis antar ulama. Jaringan kitab kuning ini

terbentuk karena adanya persamaan kepentingan dan ideologi yang lebih bersifat pemahaman keagamaan.

Sebagai pesantren tertua di Sulawesi Selatan, As'adiyah telah meletakkan tradisi intelektual di Sulawesi Selatan. Terbentuknya tradisi intelektual itu tidak dapat dipelankan dari posisi posisi dan hubungan guru-murid. Dalam tradisi intelektual pesantren mengajukan syarat-syarat orang disebut alim, ulama. *Pertama*, orang tersebut memang belajar dan mempunyai guru, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziy sebagai *madārīj al-sālikin*, atau *bi al-ta'allum* menurut istilah Imam al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Selanjutnya, *kedua*, berilmu karena "ladunni", yaitu kepandaian langsung yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang terpilih. Al-Ghazali menyebutnya sebagai 'ilmu *bi al-taqarrub* sebagai ilmu yang diperoleh langsung karena kedekatan spiritual kepada Tuhan (*spiritual impact*). Meskipun demikian, sikap ini bagi orang lain mungkin bisa disebut "primordialisme pesantren" (Arief 2007)

Dari saling silang guru-murid dan terbentuknya relasi keilmuan menempatkan posisi Sengkang-Wajo sebagai pusat keilmuan abad ke 20, khususnya sampai pada pertengahan abad 20. Boleh jadi, "Sengkang-Wajo" mulai awal abad ke 20 sampai 1970-an menjadi "al-Haramain"-nya Sulawesi Selatan sebelum beberapa pesantren lain berdiri. Jejak keilmuan Gurutta As'ad masih bisa dilihat dari penggunaan kitab kuning pada pesantren yang didirikan oleh muridnya. Hampir semuanya, tentu saja ada beberapa kitab kuning yang sudah ditambah dalam pengajian, kitab kuning yang dipakai dalam "*mangaji tudang*" (pengajian halaqah) masih dipertahankan seperti Riyādh al-Shālihīn, Tanwīr al-Qulūb, Tafsīr Jalālīn, Fath al-Mu'īn, Irsyād al-'Ibād, Syarh al-Hikam, Mau'idzat al-Mu'minīn, al-Muhazzab dan sebagainya (Arief 2007)

Perkembangan pesantren As'adiyah menjadi poros transmisi intelektual islam membawa dampak pada perubahan akses Pendidikan Islam dan perubahan metode transmisi keilmuan. Setelah pesantren As'adiyah berkembang pesat, akses Pendidikan Islam telah menyebar ke segala lapisan masyarakat

sehingga muncul ulama-ulama baru yang sama sekali tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kerajaan. Jika sebelumnya hampir semua jabatan Qadhi keturunan bangsawan, maka sejak perkembangan transmisi keilmuan yang dibangun oleh AGH Muhammad As'ad, Qadhi-Qhadi tidak lagi dibawah control kekuasaan semata. Pejabat syara', Qadhi, imam dan lain-lain sebagainya dapat berasal dari level masyarakat manapun dengan syarat penguasaan Islam yang memadai.

Akan tetapi, perkembangan pesantren As'adiyah juga mengakibatkan semakin berkembangnya halaqah-halaqah di tingkat lokal karena para santri, pencari ilmu agama memilih belajar di Sengkang di samping para guru-guru agama di masjid-masjid juga merekomendasikan kepada masyarakat untuk belajar di agama di Pesantren As'adiyah Sengkang. Pada akhirnya pesantren As'adiyah melahirkan ulama-ulama baru yang kelak terjun dalam masyarakat, baik bekerja di birokrasi pemerintahan maupun menempuh jalur Pendidikan Islam dengan mendirikan pesantren-pesantren, menjadi imam-imam yang tersebar di masjid-masjid.

4. Jaringan Ulama dalam Perubahan Sosial Politik

Memasuki periode pendudukan Jepang, jaringan global ulama boleh dikatakan terputus. Hal ini disebabkan karena situasi perang antara Sekutu dengan Jepang sehingga perjalanan haji tidak aman. Beberapa ulama Bugis yang telah berangkat ke Mekah sebelum pendudukan Jepang tidak dapat kembali dan tidak dapat melakukan komunikasi dengan daerah asal. AGH Rafi Sulaeman dan AGH Junaid Sulaeman dan beberapa ulama Bugis lainnya saat itu masih berada di Mekah.

Untuk tidak menimbulkan permusuhan di kalangan masyarakat, kebijakan Jepang sangat menghormati adat istiadat penduduk dan agama, terutama agama Islam. Oleh karena itu pemerintah penduduk militer Jepang di Makassar membubarkan organisasi-organisasi sebelumnya dan membentuk organisasi Jamiah Islamiyah serta mendatangkan dan menunjuk Haji Umar Faisal, ulama Jepang, Alumni Universitas Al-Azhar, Kairo. Ia menguasai

bahasa Arab, mahir membaca kitab kuning, dan paham tentang agama Islam menjadi ketua organisasi, kadhi-kadhi yang ada di daerah diangkat menjadi ketua cabang Jamiah Islamiyah; yang kesemuanya bergabung dalam satu wadah yang dikepalai oleh Kepala Urusan Islam yakni Haji Umar Faisal Kobayashi Tetsuo. Pemerintah Jepang berupaya mempersatukan organisasi-organisasi Islam dan membuat strukturisasi jabatan kadi.

Setelah Indonesia Merdeka, jaringan global ulama kembali menemukan ritmenya. Perjalanan Haji terus berlanjut, tradisi belajar agama di Mekah juga berlanjut sehingga dekade akhir 1950an. Jaringan ulama yang tingkat lokal yang berporos pada AGH Muhammad As'ad di Sengkang terus berkembang. Pada tahun 1947, AGH Rafi Sulaeman dan AGH Junaid Sulaeman baru dapat kembali dari Mekah setelah perjalanan haji dibuka kembali. Sulawesi Selatan ketika itu berada dalam pemerintahan Negara Indonesia Timur dibawah control pemerintah Belanda. Kendatipun perjalanan haji dibuka kembali karena perang Sekutu dan Jepang berakhir, tetapi perjalanan haji kembali menjadi bagian dari gerakan Islam secara global yang memperlihatkan antara nasionalisme dengan jaringan ulama global.

Pada periode ini perjalan haji mendapat perhatian serius terutama ketika jamah haji tiba di Indonesia. Sebuah dokumen tanggal 8 Desember 1947 dari Staat Politie Zuid Celebes bagian penyelidikan menyatakan bahwa terdapat selebaran yang diterima orang-orang yang pulang dari Mekah. Isi selebaran itu adalah seruan mendukung kemerdekaan Indonesia. Selebaran itu berasal dari Perkumpulan Kemerdekaan Indonesia (PKI) di Arab Saudi. Selain selebaran, dalam dokumen itu juga menyatakan bahwa orang-orang yang pulang dari mekah itu juga membawa majalah yang diterbitkan oleh Masj-Jashah Al Djami Al Azhar Al Sjarif di Mesir. Oleh karena itu, pemerintah Negara Indonesia Timur dibawah control Belanda melakukan pemeriksaan secara intensif setiap orang-orang yang kembali dari Mekah (Arsip Provinsi Sulawesi Reg. 734).

Kemudian pada periode pasca pengakuan kedaulatan Indonesia (1949), kembali terjadi

gejolak politik di Sulawesi Selatan dengan melibatkan sebagai besar ulama-ulama Bugis. Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar pada tahun 1952 sampai 1960an melibatkan ulama-ulama Bugis, seperti AGH Abdurrahman Ambo Dalle, AGH Rafi Sulaeman, AGH Junaid Sulaeman, AGH Abdu Muin Yusuf, dan lain-lain. Akan tetapi, terdapat juga ulama-ulama yang tidak terlibat dalam DI/TII Kahar Muzakkar dan memilih terus melanjutkan transmisi keilmuan di pesantren dan di masjid-masjid. Pada periode ini, jaringan ulama memperlihatkan dua pola berbeda namun tidak terpisah. Pada sisi lain, sebagian ulama bergabung dengan Gerakan DI/TII Kahar Muzakkar, baik dengan tujuan meneruskan transmisi keilmuan dalam Gerakan DI/TII, seperti melakukan pengajian-pengajian di wilayah kekuasaan DI/TII, maupun ulama-ulama yang tetap meneruskan transmisi keilmuan melalui Lembaga Pendidikan Pesantren, seperti pesantren As'adiyah masih terus melanjutkan tradisi keilmuan di tengah gejolak DI/TII Kahar Muzakkar.

Wilayah Bone Utara, terutama Cenrana, Pallime dan sekitarnya merupakan salah satu basis kekuatan DI/TII Kahar Muzakkar juga menjadi basis pertemuan ulama-ulama yang bergabung dalam DI/TII Kahar Muzakkar. Para ulama ini mendapat dukungan penuh dengan imam-imam masjid di wilayah ini. Akan tetapi, walaupun ulama-ulama memiliki visi yang sama dalam bergabung DI/TII, yaitu menegakan syariat Islam, terdapat perbedaan mendasar dalam hal praktek dan cara dalam transmisi keilmuan. AGH Rafi Sulaeman, dikenal ulama tersohor di daerah Bone, sering kali berselisih paham dengan aturan yang dikeluarkan oleh DI/TII Kahar Muzakkar. Bahkan AGH Rafi Sulaeman dalam riwayatnya pernah diadili oleh pengadilan DI/TII. Hal ini memperlihatkan bahwa terdapat dinamika internal dalam DI/TII dimana ulama menjadi bagian penting di dalamnya (Idrus Husein, *wawancara*, 7 Agustus 2018).

Sementara itu, ulama yang tidak tergabung dalam DI/TII Kahar Muzakkar juga tetap melanjutkan transmisi keilmuan melalui Pendidikan Islam di Pesantren. Sementara transmisi keilmuan melalui halaqah-halaqah di Masjid mulai berkurang, baik disebabkan

karena situasi tidak aman akibat perang DI/TII dengan TNI, maupun karena Pendidikan Pesantren telah menjadi Lembaga Pendidikan Islam formal yang lebih terarah dan terstruktur. Dalam bidang pemerintahan, para ulama pada dasarnya juga mengupayakan perbaikan-perbaikan hukum yang berkaitan dengan keberlangsungan sekolah-sekolah agama dan masjid. Seperti ulama memelopori peninjauan kembali peraturan yang dibuat pada masa pemerintah Hindia Belanda menyangkut urusan haji, kas masjid dan pengajaran Islam (Arsip Provinsi Sulawesi Reb. 745). Nampaknya para ulama menyadari pentingnya regulasi yang memihak kepada Pendidikan Islam, memberi keleluasaan dalam mengatur sekolah Islam yang bersumber dari pendanaan masyarakat melalui masjid, wakaf, infak dan sadaqah. Pada akhirnya, transmisi keilmuan, baik melalui pesantren maupun halaqah-halaqah di masjid tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih masyarakat.

PENUTUP

Terdapat fleksibilitas jaringan ulama di daerah Bone dan Wajo dalam merespondan menjawab perubahan-perubahan social politik dalam konteks lebih luas. Pada dekade awal abad ke 20, ketika control pemerintah Hindia Belanda menguat, transmisi keilmuan Islam yang diperankan oleh ulama bekerja secara non formal melalui pengajian-pengajian di masjid-masjid. Pada periode ini, Imam masjid memiliki peran yang sangat signifikan dalam mentransmisikan ajaran Islam. Ketika politik etis Hindia Belanda mulai menghasilkan elite baru yang terdidik, jaringan ulama pun dengan dukungan otoritas lokal merespons dengan membangun basis pendidikan yang lebih modern. AGH. Muhammad As'ad membangun MAI di Sengkang dan Andi Mappayukki mensponsori secara finansial berdirinya Madrasah Amiriah di Watampone. Pada periode berikutnya, MAI yang berubah menjadi Pesantren As'adiyah menjadi pusat transmisi keilmuan Islam di Sulawesi Selatan. Akibatnya, akses pendidikan tidak lagi terbatas pada lingkaran kekerabatan, namun melonggar dan semakin terbukanya ruang kepada setiap orang untuk belajar agama.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Arsip Sulawesi Provinsi Sulawesi

Arsip Pemerintah Daerah Bone

Buku, Artikel

- Abidin, Andi Zainal. 1983. *Persepsi Orang Bugis Makassar Tentang Hukum Negara dan Dunia Luar* (Alumni: Bandung).
- . 1999. *Kapita Selekta Sejarah Sulawesi Selatan* (Hasanuddin University Press: Makassar).
- Ali, Muhamad. 2006. 'Transmission of Islamic Knowledge in Kelantan', *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 79: 39-58.
- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Veros: New York).
- Arfah, Muhammad, and Muhammad Amir. 1993. *Biografi Pahlawan Haji Mappayukki Sultan Ibrahim: Profil Nasionalis dan Patriotik yang Konsekuen Terhadap Republik Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta).
- Arief, Syamsuddin. 2007. 'Aktor Pembentuk Jaringan Pesantren di Sulawesi Selatan 1928-1952', *Lentera Pendidikan*, X: 11.
- . 2008. 'Dinamika Jaringan Intelektual Pesantren di Sulawesi Selatan', *Lentera Pendidikan*, 11: 15.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Mizan: Bandung).
- Bruinessen, Martin van. 2005. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Mizan: Bandung).
- Burhanuddin, Jajat. 2003. 'Ulama dan Politik Pembentukan Umat: Sekilas Pengalaman Sejarah Indonesia.' in Jajat Burhanuddin and Ahmad Baedowi (eds.), *Transformasi Otoritas*

- Keagamaan: Pengalaman Islam Indonesia* (Gramedia: Jakarta).
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (LP3S: Jakarta).
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Pendidikan Kolonial* (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta).
- Halim, Wahyuddin. 2014. "Anrégurutta Haji Muhammad As'ad al-Bugisy (1907-1952) and His Pesantren's role in the Maintenance of Bugis Identity and Literacy in Contemporary South Sulawesi." In *Islam, Literas dan Budaya Lokal, Makassar*, edited by Barsihannor, 105-30. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hooker, M. B. 2003. *Indonesian Islam* (Univesity of Hawai'i Press: Honolulu).
- Mappangara, Suriadi. 2004. *Ensiklopedi Sejarah Sulawesi Selatan* (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan: Makassar).
- Mappangara, Suriadi, and Irwan Abbas. 2003. *Sejarah Islam di Sulawesi Selatan* (Biro KAPP Setda Propinsi Sulawesi Selatan dan Lamacca Press: Makassar).
- Mattulada. 1983. 'Islam di Sulawesi Selatan.' in Taufik Abdullah (ed.), *Agama dan Perubahan Sosial* (Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial: Jakarta).
- . 1985. *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Gajah Mada University Press: Yogyakarta).
- . 1989. *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan* (Hasanuddin University Press: Ujung Pandang).
- Niel, Robert van. 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Pustaka Jaya: Jakarta).
- Pawiloy, Sarita. 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah: Jakarta).
- Pelras, Christian. 2000. 'Patron-client ties among the Bugis and Makassarese of South Sulawesi', *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 156: 393-432.
- . 2006. *Manusia Bugis* (Forum Jakarta-Paris: Jakarta).
- Peluso, Nancy Lee, and J.C. Ribot. 2003. 'A Theory of Access ', *Rural Sociology*.
- Putuhena, M. Saleh. 2007. *Historiografi Haji Indonesia* (LKIS: Yogyakarta).
- Ridhwan. 2006. *Pendidikan Islam Masa Kerajaan Bone: Sejarah, Akar dan Corak Keilmuan Serta Peranan Kadi* (Unima Press: Makassar).
- Sulaeman, Asnawi. 2004. *Sejarah Singkat Keqadian (Qhadi)* (Lembaga Solidaritas Islam al-Qashash: Jakarta).
- Walinga, Muh. Hatta. 2018. *Warisan Intelektual Sang Maha Guru: Biografi K.H. Muhammad As'ad* (Zahadaniva: Solo).
- Wawancara
Idrus Husein, wawancara di Cenrana, 7 Agustus 2018.